



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam Mempercepat Reformasi Birokrasi

Jakarta, 10 Agustus 2022

AKHMAD HASMY

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan
Pengawasan Wilayah I

**# bangga
melayani
bangsa**



REFORMASI BIROKRASI

SEBAGAI *TOOLS* PERCEPATAN PRIORITAS KERJA
PRESIDEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

VISI

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong

MISI

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

PRIORITAS KERJA

1. PEMBANGUNAN SDM
2. MEMPERCEPAT DAN MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
3. UNDANG INVESTASI SELUAS - LUASNYA UNTUK MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN
4. REFORMASI BIROKRASI
5. APBN YANG FOKUS DAN TEPAT SASARAN

RB

BIROKRASI YANG BERSIH &
AKUNTABEL

BIROKRASI YANG KAPABEL

PELAYANAN PUBLIK YANG
PRIMA

Peningkatan Kinerja Pembangunan
& Pelayanan Publik



- Public trust
- public satisfaction
- Clean government
- Quality of public service
- Ease of doing business

SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN 2020-2024



ISU PELAYANAN PUBLIK

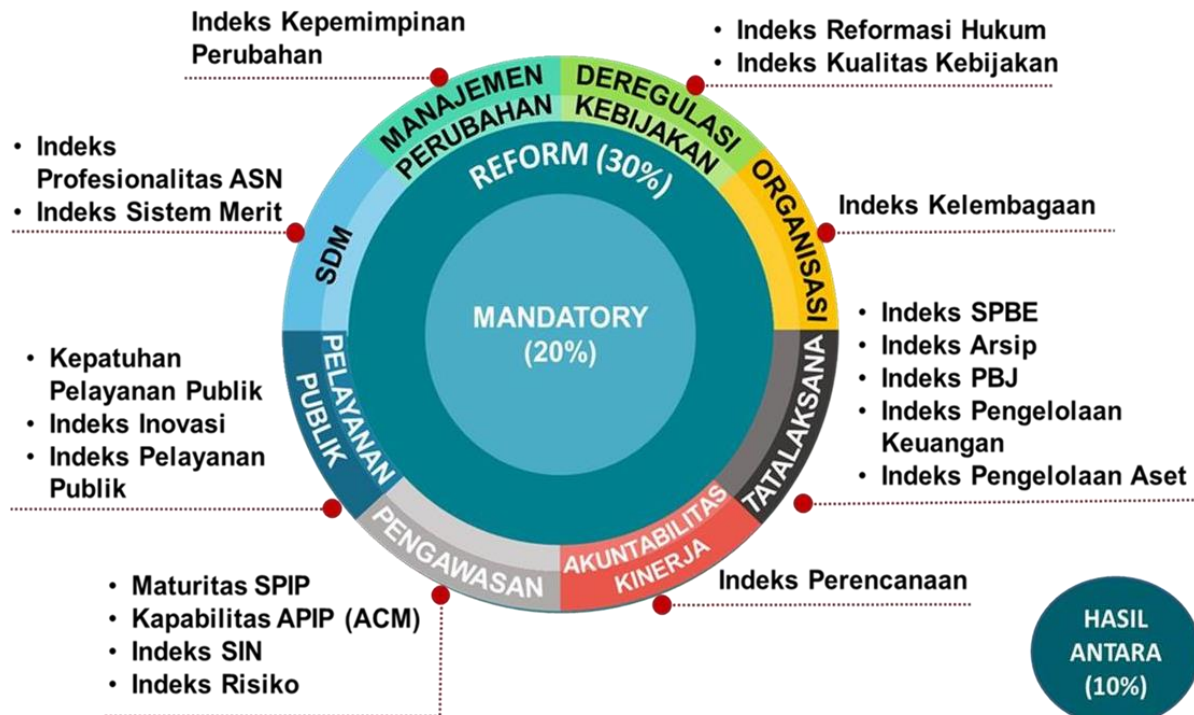
- Kurang responsive (keluhan, aspirasi dan harapan masyarakat/stake holder)
- Kurang informatif (lambat dan informasi tidak sampai).
- Kurang accessible (jauh dari jangkauan masyarakat/stake holder)
- Kurang koordinasi (tumpang tindih, kebijakan berbeda-beda).
- Birokratis (proses berbelit-belit).
- Inefisiensi (persyaratan seringkali tidak relevan dengan pelayanan).
- Desain organisasi tidak dirancang untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat



Dari berbagai sumber

KERANGKA REFORMASI BIROKRASI

KOMPONEN PENGUNGKIT



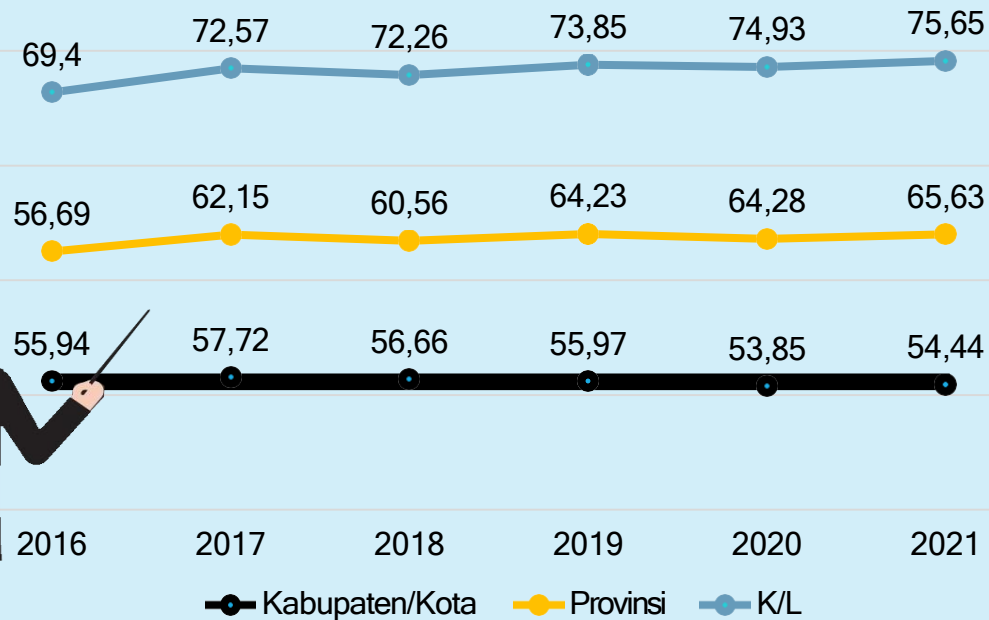
No.	Hasil Antara	Sumber Data
1.	Sistem Merit	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	LAN
3.	Kualitas Pengelolaan Aset	Kemenkeu
4.	ASN yang Profesional	BKN
5.	Implementasi SPBE	KemenPANRB
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	LKPP
7.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	Kemenkeu
8.	Kualitas Pelayanan Publik	KemenPANRB
9.	Maturitas SPIP	BPKP
10.	Kapabilitas APIP	BPKP
11.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	ORI
12.	Kualitas Pengelolaan Arsip	ANRI

KOMPONEN HASIL

No	Komponen Hasil	Sumber Data
1	Opini BPK	BPK
2	Nilai SAKIP	KemenPANRB,
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	KemenPANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	SPI - Eksternal KPK
5	Survei Internal Organisasi	SPI - Internal KPK

PERKEMBANGAN RB NASIONAL

RATA-RATA NILAI RB TAHUN 2016 - 2021



Tantangan:



Ego Sektoral yang membuat pelaksanaan RB masih parsial



Komitmen leading institution untuk mengawal program RB Nasional belum komprehensif hingga level bawah



RB kerap dipandang sekedar formalitas dan pemenuhan dokumen semata



Komitmen (kepala daerah dan kepala unit kerja) dalam mengawal program RB masih minim



RB belum berdampak signifikan pada capaian pembangunan nasional dan penyelesaian isu hilir

HUBUNGAN CAPAIAN RB DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

INDIKATOR PEMBANGUNAN	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	SUMBER DATA
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02%	5,2% - 5,5%	-2,07%	BPS
Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,28%	4,8% - 5,0%	7,07%	BPS
Angka kemiskinan (%)	9,22%	9,7%-10,2%	10,19	BPS
Rasio gini (indeks)	0,38%	0,375% - 0,380%	0,385%	BPS
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,92%	72,5	71,94	BPS



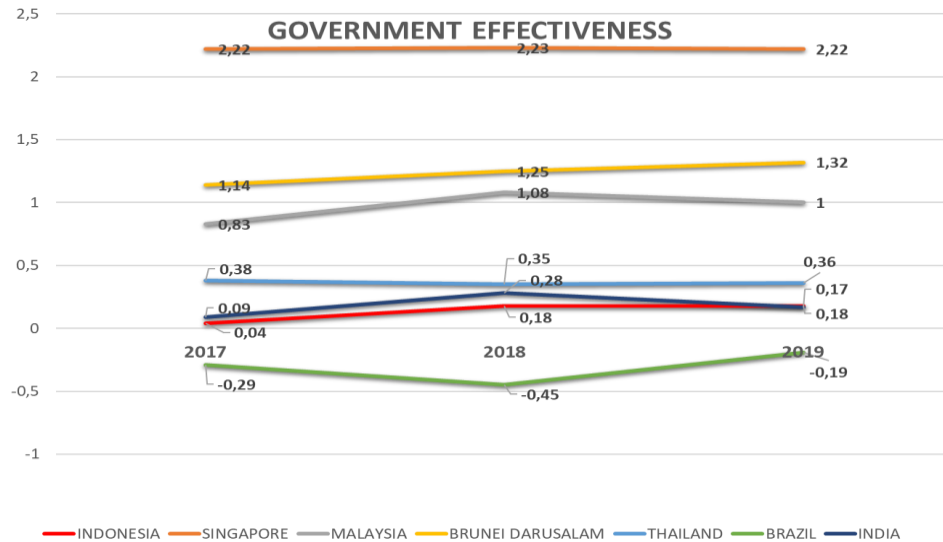
Peran pelaksanaan reformasi birokrasi perlu integrasi dengan upaya pemerintahan dalam menunjang kinerja pembangunan.



5 Prioritas Nasional



HUBUNGAN CAPAIAN RB DAN INDIKATOR GLOBAL



Peringkat 73 dari 193 negara & peringkat 5 di ASEAN

2020 General population	2021 General population	YtY Change
54 Global 27	56 Global 27	+2
82 China	77 India	-2
79 India	72 China	-10
73 Indonesia	72 Indonesia	-1
66 Thailand	69 Saudi Arabia	+8
65 UAE	68 Singapore	+6
62 Mexico	67 UAE	+2
62 Singapore	66 Malaysia	+6
61 Saudi Arabia	63 The Netherlands	+6
60 Malaysia	61 Thailand	+5
57 Kenya	59 Australia	+12
57 The Netherlands	59 Kenya	+2
53 Canada	59 Mexico	+3
53 Colombia	56 Canada	+3
51 Brazil	53 Germany	+7
50 S. Korea	52 Italy	+3
49 Argentina	51 Brazil	+2
49 Italy	50 Ireland	+5
47 Australia	48 Colombia	+5
47 U.S.	48 France	+3
46 Germany	48 S. Africa	+4
45 France	48 U.S.	+1
46 Ireland	47 Argentina	-2
45 Spain	47 S. Korea	-3
44 S. Africa	45 Spain	-1
42 Japan	45 UK	+3
42 UK	40 Japan	-2
30 Russia	31 Russia	+1

Tahun 2021, Trust Barometer Indonesia turun 1 poin. Tetap posisi 3 dari 27 negara yang disurvei

Perbaikan tatakelola pemerintahan secara optimal untuk meningkatkan capaian beberapa indikator global terkait tatakelola pemerintahan

THE WORLD BANK DOING BUSINESS Measuring Business Regulations									
HOME DATA RANKINGS REPORTS SUBNATIONAL METHODOLOGY RESEARCH BUSINESS REFORMS LAW LIBRARY CONTRIBUTORS ABOUT MEDIA									
Economy	Ease of Doing Business Rank	Rank within group	Starting a Business	Dealing with Construction Permits	Getting Electricity	Registering Property	Getting Credit	Protecting Minority Investors	Paying Taxes
Singapore	2	1	1	3	6	2	5	2	2
Hong Kong SAR, China	3	2	2	1	1	7	5	4	1
Malaysia	12	3	15	2	2	4	5	1	9
Taiwan, China	15	4	4	4	4	1	15	5	3
Thailand	21	5	7	8	3	10	9	2	6
China	31	6	5	7	5	3	13	7	17
Brunei Darussalam	66	7	3	10	8	19	1	13	12
Vietnam	70	8	14	5	7	9	2	11	18
Indonesia	73	9	18	17	10	14	9	8	10

Peringkat 73 dari 190 negara & peringkat 6 di ASEAN

ASEAN CPI 2020					Very Clean	
Rank	CPI 2020	Country	CPI 2019			
3	85	Singapore	85	→		
35	60	Brunei Darussalam	60	→		
57	51	Malaysia	53	↓		
86	40	Timor Leste	38	↑		
102	37	Indonesia	40	↓		
104	36	Vietnam	37	→		
104	36	Thailand	36	→		
115	34	Philippines	34	→		
134	29	Laos	29	→		
137	28	Myanmar	29	↓		
160	21	Cambodia	20	↑		

Tahun 2020. turun peringkat dari 85 ke 102 & peringkat 5 di ASEAN

KIP DALAM AREA PENATAAN TATALAKSANA

ASPEK PEMENUHAN

- ☐ Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)
- ☐ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- ☐ **Keterbukaan Informasi Publik**
 - Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

ASPEK REFORM

- ☐ Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan;
- ☐ SPBE yang terintegrasi;
 - mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan internal organisasi lebih cepat dan efisien;
 - Predikat Indeks SPBE.
- ☐ Transformasi digital pada proses bisnis utama, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal

Keterbukaan Informasi dalam Reformasi Birokrasi

KIP menjadi salah satu bagian upaya percepatan RB (area Penataan Tatalaksana)



Perlu kebijakan tentang KIP di setiap instansi dan memastikan pelaksanaannya



Meningkannya efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja

Hubungan KIP Dengan Area Perubahan Dalam RB

Deregulasi Kebijakan

Partisipasi Publik dalam Pembentukan kebijakan

Akuntabilitas Kinerja

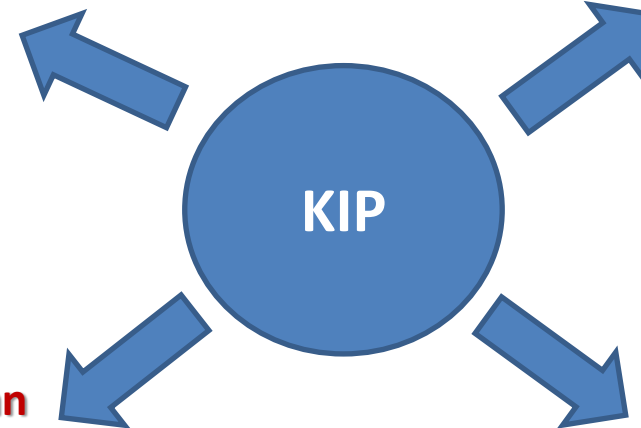
Kinerja birokrasi harus diketahui oleh masyarakat

Penguatan Pengawasan

Pengawasan masyarakat atas pelayanan umum

Pelayanan Publik

Hak masyarakat atas pelayanan publik (Standar layanan)



I Implementasi KIP

KIP memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, dan mendorong birokrasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dalam mewujudkan *good governance*



Meningkat kepercayaan
masyarakat terhadap instansi
pelayanan publik

DAMPAK YANG DIHARAPKAN

- ☐ Mengurangi /menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi;
- ☐ Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
- ☐ Meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya ataupun waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi;
- ☐ Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat, terjaminnya kepastian layanan publik bagi masyarakat;
- ☐ Terwujudnya kemudahan layanan bagi masyarakat;



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

bangga
melayani
bangsa

Terima Kasih